



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**RENCANA KERJA  
KANTOR CAMAT SUNGAI LOBAN**

**RENJA  
2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**KECAMATAN SUNGAI LOBAN**

Jl. Pemerintahan No. 1 Desa Sari Mulya

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur hanya kepada Allah swt bahwa atas taufiq serta hidayah-Nya semata, maka penyusunan “Rencana kerja (Renja) Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 telah dapat diselesaikan.

Penyusunan renja ini merupakan ketetapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan merupakan penjabaran dari Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja tahunan di Kecamatan Sungai Loban

Selanjutnya kami sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sungai Loban ini. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini belum sempurna, oleh karenanya kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan penyusunan Renja SKPD di tahun mendatang.

**Camat Sungai Loban**



**Kursani, S.Sos**

**Pembina Tk. I**

**Nip. 19680820 199009 1 003**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	2
Daftar Tabel .....	3
BAB I    PENDAHULUAN.....	4
1.1   Latar belakang .....	5
1.2   Landasan Hukum .....	8
1.3   Maksud dan Tujuan .....	10
1.4   Sistematika Penulisan .....	11
 BAB II   EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUNGAI LOBAN TAHUN LALU .....	 16
2.1   Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Loban Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Loban.....	 21
2.2   Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Loban..	10
2.3   Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Loban .....	 24
2.4   Review terhadap Rancangan Awal Kecamatan Sungai Loban .....	 25
2.5   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
 BAB III   TUJUAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	 36
3.1   Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	36
3.2   Tujuan dan Sasaran Renja .....	36
 BAB IV   PENUTUP.....	 42

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	=	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Sungai Loban dan pencapaian rencana strategis Kecamatan Sungai Loban s/d tahun 2016
Tabel 2.2	=	Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Loban
Tabel 2.3	=	Review terhadap rencana awal RKPD tahun 2015
Tabel 2.4	=	Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2017
Tabel 3.1	=	Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2017 dan prakiraan maju tahun 2018

## **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban camat kepada

bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural camat berada langsung di bawah bupati/walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan

pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya.

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga. Pentingnya hal tersebut telah disadari oleh pemerintah sebagaimana tercermin dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka perlu dibuat Rencana kerja (Renja) yang memuat rencana kerja Kecamatan Sungai Loban sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017

Menghadapi tahun 2017 kedepan, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah daerah, mempunyai kewajiban untuk membuat Renja satu tahun kedepan, terkait dengan Perencanaan dan Penganggaran kegiatan yang didanai oleh Pemerintah, baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBDN.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD mempunyai perbedaan dalam menyusun Renja SKPD dengan SKPD Dinas Instansi terkait, karena Kecamatan adalah SKPD yang lebih banyak melaksanakan program kerja sebagai implementasi pelimpahan kewenangan bupati dan perpanjangan Dinas instansi teknis lainnya dalam penjabaran programnya di wilayah kecamatan.

Selain dari pada itu anggaran kecamatan lebih terkonsentrasi kepada operasional perangkat di bawahnya seperti desa beserta perangkat lainnya.

Konsep kecamatan dapat dipandang sebagai wilayah kerja pelayanan, mengharuskan kecamatan dibentuk berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat yang secara riil. Didalam menata bentuk kecamatan sebagai wilayah kerja pelayanan adalah persoalan yang berkaitan dengan kemauan perangkat daerah ditingkat atasnya untuk melakukan pelimpahan wewenang.

Untuk menempatkan organisasi kecamatan sebagai wilayah pelayanan yang cepat dan murah, camat akan memperoleh sebagian urusan otonomi Daerah dengan pendelegasian kewenangan dari bupati.



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana kerja (Renja) Kecamatan Sungai Loban antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 tentang Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah TK II Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara dan Kotabaru dalam Wilayah Propinsi Daerah TK I Kalimantan Selatan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan
- l. Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 04 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
- p. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur –unsur Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
- q. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sungai Loban Tahun 2016 - 2020

### 1.3 Maksud dan Tujuan

1. Menyusun Renja Tahun 2017, berdasarkan potensi dan permasalahan di Kecamatan Sungai Loban dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku serta Renstra Kecamatan Sungai Loban Tahun 2016 – 2020, dan memberikan arah dan pedoman / landasan bagi semua personil / aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Mempermudah koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan pengendalian kegiatan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi baik secara vertikal, maupun eksternal.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Sungai Loban berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, adalah :

Daftar Isi  
Daftar Tabel  
Daftar Gambar

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja Kementerian dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yg dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi terget kinerja program/kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008, dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, sesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasioanal, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hal analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi skpd provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (kalau dilaksanakan).

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### **BAB IV    PENUTUP**

- a. Catatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUNGAI LOBAN TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Sungai Loban tahun lalu dan capaian renstra Kecamatan Sungai Loban**

Evaluasi kinerja pembangunan kecamatan merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah Kecamatan. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama yang mencerminkan realisasi penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Untuk melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan target yang diharapkan menurut visi dan misi Kecamatan serta sebagai bahan untuk menentukan langkah-langkah atau penyusunan kebijakan yang harus ditempuh berdasarkan kondisi capaian yang ada, dan dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar lebih terfokus, telah ditetapkan beberapa indikator yang dijadikan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

#### **2.2 Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Loban**

Kecamatan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mempunyai perbedaan dalam menyusun Renja SKPD dengan

satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Instansi terkait, karena Kecamatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lebih banyak melaksanakan program kerja sebagai implementasi pelimpahan kewenangan bupati dan perpanjangan Dinas instansi teknis lainnya dalam penjabaran programnya di wilayah kecamatan.

Selain dari pada itu anggaran Kecamatan lebih terkonsentrasi kepada operasional perangkat di bawahnya seperti desa beserta perangkat lainnya.

Konsep kecamatan dapat dipandang sebagai wilayah kerja pelayanan, mengharuskan kecamatan dibentuk berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat yang secara riil. Didalam menata bentuk kecamatan sebagai wilayah kerja pelayanan adalah persoalan yang berkaitan dengan kemauan perangkat Daerah ditingkat atasnya untuk melakukan pelimpahan wewenang.

Untuk menempatkan organisasi kecamatan sebagai wilayah pelayanan yang cepat dan murah, Camat akan memperoleh sebagian urusan otonomi daerah dengan pendelegasian kewenangan dari bupati.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang pemerintahan.
- b. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang ekonomi dan pembangunan.
- a. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata.

- b. Pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Issue strategis yang berpengaruh terhadap penyusunan Renja Kecamatan Sungai Loban timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

**a. Issue-issue internal dilingkungan Kantor Kecamatan Sungai Loban antara lain :**

- 1) SDM yang belum profesional.
- 2) Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi.
- 3) Sistem kerja yang belum optimal.
- 4) Administrasi yang belum tertib.

**b. Issue-issue eksternal strategis antara lain :**

- 1) Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antar golongan .
- 2) Perkembangan Permukiman yang belum asri.
- 3) Peningkatan Potensi pengembangan Jasa Perdagangan.
- 4) Akses Informasi terpadu belum tersedia.
- 5) Belum adanya peran aktif masyarakat dalam menciptakan rasa aman.
- 6) Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative.
- 7) Belum terciptanya suasana lingkungan yang bersih dan indah
- 8) Adminsitasi kependudukan masih belum termanagemen dengan baik
- 9) Partisipasi perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat masih belum optimal dan terkoordinatif
- 10) Pusat pelayanan administrasi yang berhubungan dengan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten relative sangat jauh

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2016 dan realisasi Renstra meliputi seluruh program dan kegiatan dikelompokkan menurut Renja Kecamatan Sungai Loban Tahun 2017, kategori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Evaluasi ini menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun 2017 terhadap Renstra.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2016 ini mencakup realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang diharapkan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD, dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

#### 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan [Musrenbang] Kecamatan Sungai Loban Tahun 2016 yang akan diusulkan pada Tahun Anggaran 2017 Terlampir.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tercapai tidaknya indikator kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun perencanaan. Indikator kinerja Kecamatan akan mempengaruhi pencapaian kinerja Kabupaten Tanah Bumbu, kinerja kabupaten Tanah Bumbu akan mempengaruhi pencapaian kinerja propinsi Kalimantan Selatan, demikian pula dengan indikator kinerja nasional sangat dipengaruhi oleh tingkat capaian kinerja seluruh provinsi.

Dengan demikian untuk mencapai kinerja yang sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, diperlukan adanya sinergi program dan kegiatan serta pendanaannya agar dapat tercapai kinerja yang diharapkan. Sinergi diharapkan dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaksanaan di lapangan

##### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja**

###### **A. Tujuan**

Tujuan renja yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Loban :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi yang lebih baik dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.
2. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak sehingga tercipta pelayanan yang prima.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia [Aparatur] Desa dan Kecamatan yang Profesional.

4. Mewujudkan terciptanya Koordinasi yang baik antar organisasi kelembagaan yang ada di Kecamatan dan Desa.

## **B. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Sungai Loban adalah :

1. Tertatanya sistem Administrasi Perangkat Kecamatan Sungai Loban secara profesional sehingga terciptanya sistem Pelayanan Administrasi yang cepat, tepat dan berkualitas.
2. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana pendukung sehingga terciptanya sistem Pelayanan Administrasi yang handal
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia [Aparatur] Pemerintahan Kecamatan Sungai Loban yang berkualitas
4. Meningkatkan Partsipasi Organisasi Kelembagaan didalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

## **c. Program dan Kegiatan**

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja
- f. Penyediaan alat tulis kantor
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- i. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- k. Penyediaan jasa tenaga Non PNS
- l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

**3. Program peningkatan disiplin aparatur**

- a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

**4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**

- a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

**5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa**

- a. Pelaksanaan muswarah pembangunan desa

**6. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan**

- a. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

**7. Program Penataan Daerah Otonom Baru**

- a. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Penataan Tapal Batas Antar Kecamatan dan Desa

**8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Loban 2017 merupakan penjabaran dari substansi Renstra Kecamatan Sungai Loban Tahun 2016-2020, mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020.

Dari pencermatan jangka waktu rencana, Renja Tahun 2017 merupakan rencana tahun kedua dari Renstra Kecamatan Sungai Loban. Pada tahun pertama ini dijadikan tahapan pengembangan, dimana rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun 2017 ini adalah upaya pengembangan menuju capaian target-target pembangunan sesuai Misi Renstra. Tahapan ini sangat menentukan tahapan-tahapan berikutnya.

Renja Kecamatan Sungai Loban Tahun 2017, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Asumsi utama berhasilnya pencapaian sasaran Renja Tahun 2016 adalah adanya komitmen dan kebersamaan dari segenap komponen daerah, baik komponen pemerintahan daerah, sektor dunia usaha maupun masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Sungai Loban Tahun 2017 yang akan melandasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran [RKA] Kecamatan Sungai Loban Tahun Anggaran 2017. Serta Renja Kerja [Renja] Kecamatan Sungai Loban disusun sedemikian rupa sebagai acuan/panduan ke depan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu dengan tidak lepas koordinasi / kebersamaan dalam melangkah dari instansi-instansi yang terkait, kurang lebihnya mohon maaf mungkin ada kalimat yang kurang atau salah .

Camat Sungai Loban



**Kursani, S.Sos**  
**Pembina Tk. I**

**Nip. 19680820 199009 1 003**



**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Loban**  
**dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sungai Loban s.d Tahun 2016 (tahun berjalan)**  
**Kabupaten Tanah Bumbu**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 s/d 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2014	Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2015	Realisasi Renja SKPD tahun 2015	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun 2015)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		4	5	6	7	8=(7/6)x100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)x100
1.20	<b>Pemerintahan Umum</b>									
1.20.11	<b>Kecamatan Sungai Loban</b>									
<b>1.20.11.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administarsi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%					100%		
1.20.11.01.01.02	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa sarana komunikasi, sumberdaya air dan listrik	300 bulan					60 bulan		
1.20.11.01.01.06	2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	100%					100%		
1.20.11.01.01.07	4) Penyediaan Jasaa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan	60 bulan					12 bulan		
1.20.11.01.01.08	3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya jasa kebersihan Kantor	1060 item					212 item		
1.20.11.01.01.09	5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan / perlengkapan kantor	100%					100%		
1.20.11.01.01.10	6) Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1.785 item					315 item		

1.20.11.01.01.11	Penyediaan Barang 7) Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya jasa penggandaan	225.000 lbr					40.000 lbr		
1.20.11.01.01.12	Penyediaan Komponen 8) Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	510 item					102 item		
1.20.11.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan 9) Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1.142 item					93 item		
1.20.11.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	100%					100%		
1.20.11.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga 11) Non PNS	Terbayarnya jasa tenaga Non PNS	715 OB					143 OB		
1.20.11.01.01.22	Rapat-rapat Koordinasi 12) dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	100%					100%		
1.20.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					100%		
1.20.11.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / 1) Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	100%					100%		
1.20.11.01.02.22	Pemeliharaan Rutin / 2) Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100%					100%		
1.20.11.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan Disiplin Aparatur	100%					100%		
1.20.11.01.03.05	Pengadaan Pakaian 1) Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik Tradisional yang dibeli	175 stel					35 stel		
1.20.11.01.05	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	100%					100%		
1.20.11.01.05.01	1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	100%					100%		
1.20.11.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1 dokumen					1 dokumen		

1.20.11.01.17.02	1) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Dokumen hasil Musrenbang Kecamatan	1 dokumen					1 dokumen		
1.09.xx.17	<b>Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan</b>	<b>Menyelesaikan Konflik-Konflik Pertanahan</b>	100%					100%		
1.09.xx.17.01	1) Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Terfasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	100%					100%		
1.20.xx.20	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	100%					100%		
1.20.xx.20.xx	1) Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan	Terselenggaranya Sistem Pelayanan Publik Kecamatan	100%					100%		
1.20.xx.27	<b>Program Penataan daerah Otonomi Baru</b>	<b>Tertatanya Daerah Otonomi Baru</b>	100%					100%		
1.20.xx.27.05	1) Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas Antar Kecamatan dan Desa	Terfasilitasinya Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas Antar Kecamatan dan Desa	100%					100%		

Camat Sungai Loban



**KURSANI, S.Sos**  
Pembina Tk. I  
Nip. 19680820 199009 1 003

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Loba**  
**Kabupaten Tanah Bumbu**

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016				Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			60 bulan						60 bulan	60 bulan	
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			100%						100%	100%	
3	Penyediaan Jasaa Administrasi Keuangan			212 item						12 bulan	12 bulan	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			12 bulan						212 item	212 item	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			100%						100%	100%	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor			315 item						315 item	315 item	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			35.000 lbr						40.000 lbr	45.000 lbr	
8	Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			102 item						102 item	102 item	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			355 item						93 item	355 item	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah			100%						100%	100%	

11	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			143 OB						143 OB	143 OB	
12	Rapat-rapat Koordinasi dalam Daerah			100%						100%	100%	
13	Terpeliharanya rumah dinas			1 unit						1 unit	1 unit	
14	Terpeliharanya gedung kantor			1 unit						1 unit	1 unit	
15	Jumlah pakaian Batik Tradisional yang dibeli			35 stel						35 stel	35 stel	
16	Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan			100%						100%	100%	
17	Dokumen hasil Musrenbang Kecamatan			1 dokumen						1 dokumen	1 dokumen	
18	Terfasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			100%						100%	100%	
19	Terselenggaranya Sistem Pelayanan Publik Kecamatan			100%						100%	100%	
20	Terfasilitasinya Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas Antar			100%						100%	100%	

Camat Sungai Loban



**KURSANI, S.Sos**  
Pembina Tk. I  
Nip. 19680820 199009 1 003

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2018**  
**Kabupaten Tanah Bumbu**

Kecamatan Sungai Loban

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Terencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.20	Pemerintahan Umum									
1.20.11	Kecamatan Sungai Loban									
1.20.11.01.01	Program Pelayanan Administarsi Perkantoran		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sungai Loban	100%	959.600.650	APBD		100%	1.042.440.565
1.20.11.01.01.02	1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa sarana komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kecamatan Sungai Loban	60 bulan	16.080.000	APBD		60 bulan	19.920.000
1.20.11.01.01.06	2)	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	Kecamatan Sungai Loban	100%	48.450.000	APBD		100%	51.695.000
1.20.11.01.01.07	4)	Penyediaan Jasaa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Sungai Loban	12 bulan	111.738.000	APBD		12 bulan	114.707.400
1.20.11.01.01.08	3)	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya jasa kebersihan Kantor	Kecamatan Sungai Loban	212 item	5.359.200	APBD		212 item	5.627.160
1.20.11.01.01.09	5)	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan / perlengkapan kantor	Kecamatan Sungai Loban	100%	5.200.000	APBD		100%	5.800.000

1.20.11.01.01.10	6)	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Sungai Loban	315 item	11.982.350	APBD		315 item	12.972.350
1.20.11.01.01.11	7)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya jasa penggandaan	Kecamatan Sungai Loban	40.000 lbr	10.000.000	APBD		45.000 lbr	11.250.000
1.20.11.01.01.12	8)	Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sungai Loban	102 item	3.551.100	APBD		102 item	3.728.655
1.20.11.01.01.13	9)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Sungai Loban	93 item	195.500.000	APBD		355 item	265.000.000
1.20.11.01.01.18	10)	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Kecamatan Sungai Loban	100%	149.800.000	APBD		100%	149.800.000
1.20.11.01.01.19	11)	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Terbayarnya jasa tenaga Non PNS	Kecamatan Sungai Loban	143 OB	230.100.000	APBD		143 OB	230.100.000
1.20.11.01.01.22	12)	Rapat-rapat Koordinasi dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Kecamatan Sungai Loban	100%	171.840.000	APBD		100%	171.840.000
<b>1.20.11.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur</b>		<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Kecamatan Sungai Loban	100%	<b>90.000.000</b>	APBD		100%	<b>90.000.000</b>
1.20.11.01.02.21	1)	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Kecamatan Sungai Loban	100%	45.000.000	APBD		100%	45.000.000
1.20.11.01.02.22	2)	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Sungai Loban	100%	45.000.000	APBD		100%	45.000.000
<b>1.20.11.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Meningkatkan Disiplin Aparatur</b>	Kecamatan Sungai Loban	100%	<b>14.000.000</b>	APBD		100%	<b>14.000.000</b>
1.20.11.01.03.05	1)	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian Batik Tradisional yang dibeli	Kecamatan Sungai Loban	35 stel	14.000.000	APBD		35 stel	14.000.000

1.20.11.01.05	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Kecamatan Sungai Loban	100%	2.041.375.500	APBD		100%	241.300.000
1.20.11.01.05.01	1)	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	Kecamatan Sungai Loban	100%	2.041.375.500	APBD		100%	241.300.000
1.20.11.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kecamatan Sungai Loban	1 dokumen	116.250.000	APBD		1 dokumen	116.250.000
1.20.11.01.17.02	1)	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Dokumen hasil Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Sungai Loban	1 dokumen	116.250.000	APBD		1 dokumen	116.250.000
1.09.xx.17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		Menyelesaikan Konflik-Konflik Pertanahan	Kecamatan Sungai Loban	100%	43.800.000	APBD		100%	43.800.000
1.09.xx.17.01	1)	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Terfasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Kecamatan Sungai Loban	100%	43.800.000	APBD		100%	43.800.000
1.20.xx.27	Program Penataan daerah Otonomi Baru		Tertatanya Daerah Otonomi Baru	Kecamatan Sungai Loban	100%	21.900.000	APBD		100%	-
1.20.xx.27.05	1)	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas Antar Kecamatan dan Desa	Terfasilitasinya Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas Antar Kecamatan dan Desa	Kecamatan Sungai Loban	100%	21.900.000	APBD			



1.20.xx.20	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Sungai Loban	100%	48.844.000	APBD		100%	48.844.000
1.20.xx.20.xx	1)	Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan	Terselenggaranya Sistem Pelayanan Publik Kecamatan	Kecamatan Sungai Loban	100%	48.844.000	APBD		100%	48.844.000
J U M L A H						3.313.870.144				1.596.634.555

Camat Sungai Loban



**KURSANI, S.Sos**

Pembina Tk. I

Nip. 19680820 199009 1 003